



OPTIMALISASI KANTOR BI DI DAERAH

INDAH KURNIA,
ANGGOTA FRAKSI PDI
PERJUANGAN KOMISI XI DPR RI

TUGAS UTAMA BANK INDONESIA

- Menjaga dan Memelihara Kestabilan Nilai Rupiah:
 - (1) Rupiah stabil terhadap barang dan jasa,
 - (2) Rupiah stabil terhadap mata uang negara lain
- Dalam menjalankan tugas utama diatas, BI memiliki wewenang:
 - (1) Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter,
 - (2) Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran
- Goals BI:
 - (1) Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui domain moneter,
 - (2) Tercipta sistem keuangan yang kokoh terhadap gejolak eksternal dan internal
 - (3) Terciptanya sistem keuangan yang terakses secara luas untuk kepentingan nasional

REPOSISI BI PASKA OJK

Fokus BI pada Kebijakan Moneter & Pengaturan system Pembayaran

Kebijakan Moneter dan makroprudensial Optimal Policy mix:

- ❑ Menjaga Kestabilan Rupiah
- ❑ Ketahanan Ek Nasional

- ❑ Kebijakan suku bunga (BI rate). Melalui operasi moneter untuk mengendalikan liquiditas dan suku bunga di pasar uang agar sesuai dengan kebijakan suku bunga tersebut.
- ❑ Kebijakan nilai tukar diarahkan agar stabilitas nilai tukar Rupiah tetap terjaga dan tingkatnya sesuai dengan kondisi fundamental. Kalibrasi dilakukan agar pergerakan nilai tukar Rupiah mendukung pengendalian inflasi, kesehatan neraca pembayaran, dan pertumbuhan ekonomi.
- ❑ Kebijakan untuk pengendalian modal asing khususnya yang berjangka pendek dan cenderung yang spekulatif. Implementasi kebijakan ini melalui kewajiban memegang SBI minimal satu bulan dan pembatasan utang luar negeri perbankan.
- ❑ Kebijakan makroprudensial terhadap aktivitas system perbankan, termasuk pengendalian liquiditas dan perkembangan kredit. Implementasinya melalui kenaikan Giro Wajib Minimum, penerapan *Loan to Value Ratio* (LTV) maupun yang lain.
- ❑ Koordinasi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dan penguatan komunikasi kebijakan. Koordinasi kebij moneter, fiskal dan kebij ek lainnya TPI/TPID

AGENDA DAN TANTANGAN BI KEDEPAN

- 1. Pengendalian inflasi dan suku bunga rendah melalui efisiensi perbankan & Pengendalian TPI/TPID**
- 2. Stabilitas nilai tukar Rupiah dan pendalaman pasar keuangan**
- 3. Penguatan kebijakan makroprudensial dan koordinasi dengan OJK. Pengaturan dan pengawasan makroprudensial dilakukan di Bank Indonesia, fokusnya pada pengawasan terhadap bank-bank yang beresiko sistemik, pengendalian resiko sistemik, dan pengembangan pasar dan akses keuangan**
- 4. Pemberdayaan sektor riil, UMKM dan ekonomi daerah; BI berperan sebagai fasilitator, inisiator, dan advisor**
- 5. Penguatan koordinasi dengan pemerintah dan komunikasi kebijakan, koordinasi fiscal dan TPI/TPID**

POSTUR EKONOMI JATIM

- Data dari tahun ke tahun, angka impor Jatim lebih tinggi daripada angka eksportnya, sepanjang tahun 2016 angka ekspor Jatim Rp. 214,4 triliun, sementara angka impor mencapai Rp. 241 triliun. Tahun 2017 angka ekspor Jatim mencapai Rp. 205,2 triliun dan impor mencapai Rp. 270,3 triliun Defisit perdagangan ini memberikan tekanan terhadap rupiah jika posisi USD menguat seperti saat ini.
- Kinerja pengendalian inflasi di Jawa Timur berjalan dengan baik. Angka inflasi Jatim dari tahun 2016 – Triwulan II 2018 berkisar $\pm 3\%$. Terjaganya kinerja pengendalian inflasi berdampak pada terkendalinya harga kebutuhan makanan, makanan jadi, transportasi, perumahan, komunikasi dan jasa keuangan.
- Penyaluran kredit perbankan masih bertumpu di kota kota seperti Malang, Surabaya, Gresik dan Sidoarjo. Ini menandakan pembangunan masih bertumpu pada urban sentris. Dari sisi pelaku usaha, proporsi kredit UMKM juga masih rendah. Proporsinya masih 26,3%. Terjadi pelambatan kredit modal kerja pada sektor UMKM

- Meskipun Nilai Tukar Petani meningkat 105,5 Tw II 2018 dari 103 Tw II 2017, namun pertumbuhan ekonomi sektor ini juga tidak membahagiakan, padahal sektor ini menjadi penyumbang lapangan kerja terbesar. Pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2016 sebesar 2,4% turun pada tahun 2017 mencapai 1,48%. Landainya pertumbuhan sektor pertanian juga tercermin pada lantainya pertumbuhan kredit sektor pertanian. Bahkan jika dibandingkan dengan Tw II 2017, kredit pertanian turun dari 10,4% menjadi 7% pada Tw II 2018.
- Terjadi peningkatan capital outflow sepanjang Tw II 2018 sebesar Rp. 36,56 triliun. Keluarnya modal ini meningkat 99,3% jika dibandingkan dengan Tw I 2018. Membesarnya capital outflow ini sejalan dengan data angka pertumbuhan impor yang tinggi dari bahan konsumsi, dan impor barang modal terutama komponen kereta api dari PT INKA Jatim.
- Terjadi peningkatan transaksi tunai jika dibandingkan dengan transaksi non tunai. Transaksi non tunai melalui SKNBI mengalami penurunan 7% dari Tw I ke Tw II 2018, bahkan jika dibandingkan dengan Tw II 2017 mengalami penurunan 13,9%. Semoga saja ini penurunan bersifat temporal karena pengaruh lebaran.

PERAN KANTOR PERWAKILAN BI DI JATIM

- Membantu kinerja ekspor daerah dengan fasilitasi informasi akses pasar, kebijakan lindung nilai yang diperluas untuk impor bahan baku bagi pelaku industri di Jawa Timur.
- Memperluas jangkauan sistem pembayaran hingga keberbagai pelosok Jawa Timur dengan memperkenalkan lebih dalam GPN dan berbagai sosialisasi ke kelompok sasaran dengan memberikan insentif lebih besar bagi para pengguna GPN, terutama bagi kelompok konsumsi rumah tangga.
- Mendorong pertumbuhan baru UMKM dengan berbasis pesantren, terutama di wilayah tapal kuda, Malang Selatan, dan Mataraman, dengan membantu pembentukan inkubasi bisnis untuk peer mentoring hingga mandiri.
- Membantu fasilitasi tumbuhnya industri kreatif dari anak-anak muda, dengan membentuk rumah-rumah kreatif diberbagai daerah di Jatim, misalnya Kota Batu, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Jember, Kab Banyuwangi dan Kab Sumenep.

- Memperluas cakupan kerjasama dengan pemerintah daerah, terutama dengan pemda yang tingkat inflasi didaerahnya tinggi. Bahkan jika diperlukan membantu pemda membuat dashboard sistem logistik daerah untuk memudahkan monitoring dan mitigasi jika pergerakan barang dan jasa di daerah.
- Melakukan monitoring dan evaluasi berbagai program LKD, konsentrasi agen LKD yang masing memusat di Kota Surabaya menunjukkan bahwa kinerja perluasan finansial inclusion belum bergerak ke arah pinggir yang justru itu harusnya menjadi sasaran dari kantor kantor perwakilan BI di daerah daerah. Dari 37.744 agen LKD di Jatim pda Tw II 2018, 3.149 diantaranya untuk area Surabaya.
- Pusat pusat kegiatan ekonomi di lingkungan pesantren harusnya menjadi sasaran yang perlu dikembangkan untuk penumbuhan agen LKD. Termasuk juga wilayah wilayah yang secara potensi pariwisatanya sangat besar seperti Kota Batu, Kab Malang dan Kab Banyuwangi.